



PERTANYAAN & MASUKAN
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR RI
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI DENGAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
SENIN, 28 Maret 2022

Agenda : (1) Tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV;
(2) Program Prioritas Tahun 2023; dan
(3) Isu-isu Aktual Lainnya.

Disampaikan oleh : Ir. Dwita Ria Gunadi

No Anggota : A - 76

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Kita Untuk Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Indonesia Raya...!

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik. Amin ya rabbal alamin.

Yang Terhormat,

- **Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI**
- **Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan**
- **Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI beserta jajaran.**

Mewakili Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Kami ijin menyampaikan ringkasan tanggapan, pertanyaan, saran dan masukan dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra.

1. Saat Komisi IV melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Riau ternyata selama ini KLHK belum memiliki data inventarisasi kepemilikan/penguasaan lahan kebun Sawit Masyarakat di dalam Kawasan Hutan, seperti: nama, luas, status kepemilikan, dll. Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra **meminta KLHK agar segera melengkapinya paling lambat bulan Agustus 2022 dan jangan sampai lewat dari waktu yang sudah kita sepakati**. Kami juga meminta untuk memprioritaskan perihal penyelesaian kebun-kebun sawit milik rakyat yang berada di dalam kawasan hutan. Selama ini penegakan hukum untuk pembukaan kebun secara ilegal dalam kawasan hutan masih sangat minim dan agar di kerjakan secara maksimal karena kerugian negara dari pembukaan lahan hutan ilegal sangat besar, terutama di Provinsi Riau. Dan kami menegaskan kembali untuk KLHK memberikan data-data yang ada di Riau.
2. Dalam rangka upaya mitigasi bencana banjir dan longsor di areal DAS, Fraksi Partai Gerindra meminta agar dilakukan pendekatan secara holistik dan terpadu, termasuk penataan DAS dan peningkatan kerjasama dengan Kementerian terkait lainnya. Mengingat sampai bulan Maret 2020 ini masih terdapat banjir yang melanda beberapa daerah di Indonesia, seperti: Kutai Timur, Malang, Cilacap dan Banyumas. Adanya bencana banjir yang telah berlansung di beberapa daerah sejak tahun 2021 ini juga perlu diwaspadai, karena pada siklus tahun berikutnya biasanya diikuti oleh musim kemarau yang akan berdampak kepada Kebakaran Hutan dan Lahan. Sehingga upaya mitigasi terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan juga perlu dilakukan sejak dini.
3. Kerusakan dan alih fungsi kawasan hutan juga memberikan konsekuensi kepada terjadinya peningkatan konflik antara satwa liar dengan manusia. Hampir sepanjang tahun 2021, konflik antara Gajah dan Harimau dengan manusia terjadi di Sumatera. Sekitar awal bulan Februari, seekor Orangutan ditemukan berkeliaran di daerah Bengalon Kabupaten Kutai Timur, dan sekitar pertengahan bulan Maret ini dijumpai 2 ekor buaya di Kabupaten Kutai Timur yang salah satunya hampir memangsa seorang anak. Fraksi Partai Gerindra meminta KLHK agar bersungguh-sungguh melaksanakan langkah korektif di sektor kehutanan yang telah dicanangkan. Mengingat banyaknya keterkaitan antara satu hal dengan hal lainnya dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Hutan.
4. Melihat pola penanganan kasus LHK yang terjadi dilapangan, baik berupa pertambangan dan perkebunan ilegal, pendudukan kawasan hutan, dll. Fraksi Partai Gerindra meminta agar KLH dan jajaran terkait dapat meningkatkan upaya pencegahan melalui deteksi dini dan reaksi cepat agar keterlanjuran kerusakan LH & KH tidak meluas dan penyelesaian konflik menjadi lebih berat serta berbiaya besar. Demikian pula dengan penerimaan laporan/pengaduan yang diberikan oleh masyarakat, agar dapat diberikan tanggapan tertulis yang lebih cepat sehingga dapat segera diselesaikan dan tidak sampai kehilangan Lampiran (Barang Bukti), sebagaimana yang telah dikeluhkan oleh Perwakilan masyarakat dari Desa Berurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.
5. Berdasarkan ringkasan RAPBN KLHK Tahun 2023, terdapat Rencana Pendapatan melalui PNPB sebesar Rp 5,268 Trilyun dan Rencana Belanja sebesar Rp 11,221 Trilyun. Mengingat biaya belanja lebih besar daripada pendapatan, Fraksi Partai Gerindra meminta agar KLHK bersungguh-sungguh dalam merencanakan dan

melaksanakan program-program kerjanya agar di masa yang akan datang pendapatan KLHK semakin meningkat sehingga dapat mengimbangi biaya belanja yang dikeluarkan.

6. Pasca COP 25 semua negara saat ini diminta untuk meninjau kembali dan memperkuat target *National Determined Contribution* (NDC) mereka pada tahun 2022, terutama yang tidak selaras dengan tujuan penurunan suhu bumi. **Jika 1,5°C ingin dicapai, dibutuhkan ambisi yang lebih besar.** Tahun 2030 sudah di depan mata, dan pekerjaan rumah dari Glasglow perlu segera diselesaikan. Fraksi Partai Gerindra meminta agar *National Determined Contribution* (NDC) Indonesia **dikaji ulang. Bukan hanya untuk meningkatkan ambisi reduksi emisi gas rumah kaca, tapi juga untuk disinkronkan dengan lima agenda terobosan Glasgow.** Secara simultan agenda terobosan ini perlu diintegrasikan dan disinkronisasikan dengan rencana pembangunan yang sudah/ sedang berjalan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Karena terobosan Glasglow ini menekankan kerjasama teknologi antara pemerintah dan pelaku bisnis, maka dibutuhkan strategis road map sampai tahun 2030 dan setelahnya. Diperlukan komitmen yang tinggi paling tidak dalam rencana pembangunan nasional jangka pendek menengah dan jangka panjang dengan memperhitungkan aspek-aspek, politik dan ekonomi.
7. Lokasi IKN bukan tanah kosong atau benar-benar dikuasai oleh negara, ada tumpang tindih dengan konsesi dan masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya dari alam. Tumpang-tindih penguasaan lahan yang terjadi di wilayah IKN akibat tidak dijalanannya reforma agraria dan pengakuan hak atas tanah. Fraksi Partai Gerindra meminta agar Pemantapan Kawasan Hutan dan penyelesaian berbagai konflik lahan di dalam Kawasan Hutan IKN perlu dilakukan sebelum membangun IKN. Dari kunjungan reses wakil ketua komisi IV DPR RI, calon ibu kota baru memperlihatkan bahwa lokasi tersebut sebagian besar telah dikuasai oleh izin-izin korporasi, baik itu di sektor kehutanan, pertanian, ataupun pertambangan. Kondisi ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait bagaimana skema untuk pembebasan lahan-lahan yang telah dikuasai oleh korporasi tersebut. Selain itu tercatat ada sekitar 21 kelompok masyarakat adat yang mendiami kawasan IKN dalam kajian KLHS dan perencanaan IKN masyarakat adat harus menjadi bagian dari pembangunan wilayah tersebut.
8. Ancaman mangrove pada Hulu Teluk Balikpapan turut tercakup dalam wilayah IKN atau ring dua yang mengancam keberadaan ekosistem mangrove. Dari hasil pengamatan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ketika reses di dapil, Ekosistem ini membentang dari Kecamatan Balikpapan Barat hingga pesisir teluk di wilayah Kecamatan Penajam. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumber wilayah administrasi Kota Balikpapan mengelilingi lekuk tubuh ekosistem Teluk Balikpapan hingga kemudian membentang hingga DAS Riko di wilayah administrasi Kabupaten PPU. Manfaat mangrove bagi layanan fungsi alam sekitar dan bagi ekonomi masyarakat serta habitat di Teluk Balikpapan antara lain perannya yang penting untuk sektor perikanan, sumber makanan dan pusat pertumbuhan berbagai jenis ikan, udang dan kepiting. Hal lainnya, mangrove berfungsi sebagai penyerap karbon. Tidak hanya itu, mangrove juga melindungi wilayah pesisir dari erosi, sedimentasi dan badai maupun tsunami. Kami Fraksi Partai Gerindra juga meminta kepada KLHK untuk menyusun tahapan pemulihan dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di kawasan IKN sebagai upaya pemulihan kawasan hutan dengan rehabilitasi kawasan yang terdegradasi serta pembangunan koridor satwa dan koridor hijau

9. Fraksi Partai Gerindra meminta kepada KLHK agar pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menjadi agenda tahunan BPDASHL. Dalam hal ini untuk lokasi penanaman khususnya daerah rawan bencana, daerah lahan kritis, dan daerah bekas tambang diluar Kawasan hutan karena semuanya bisa berdampak terhadap masyarakat sekitar Namun demikian perlu dievaluasi dan dilaporkan keberhasilan serta perkembangannya secara berkala.
10. Fraksi Partai Gerindra minta kepada KLHK untuk mengadakan program pendampingan terhadap masyarakat terkait pengolahan limbah, program bang sampah di setiap Kota/ Kabupaten yang belum ada alat pengolahan limbah. Dalam hal ini untuk program periotas tahun 2023 agar lebih ditingkatkan khususnya terkait program pendampingan pengolahan limbah yang melibatkan masyarakat agar bisa meningkatkan ekonominya.
11. Digitalisasi akan terjadi di setiap lembaga baik yang berdampak positif maupun negatif pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan politik. Oleh karena itu transformasi **digital kehutanan 4.0 harus diarahkan mendukung ekonomi hijau, yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat, ramah lingkungan, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan dan inklusif secara sosial sebagai antitesa model pembangunan konvensional yang mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam**. Kami Fraksi Gerindra mengapresiasi sejauh ini KLHK telah mengembangkan sistem pelayanan informasi berbasis aplikasi digital, di antaranya Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Online (SIMPONI) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Selain itu telah dirilis kebijakan Multi Usaha Kehutanan, serta penerapan beberapa kegiatan usaha dalam satu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Maka dari itu Kami Fraksi Gerindra meminta **guna mendukung transformasi digital di bidang kehutanan, perlu disiapkan pula sumber daya manusia dengan transformasi persepsi dan nilai-nilai guna mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya hutan** di masa depan, serta menjadi aktor pembangunan yang mendukung akselerasi inovasi kehutanan 4.0.
12. Pencemaran lingkungan hidup akibat degradasi DAS, polutan dari tambang legal dan ilegal yang masih menjadi masalah laten di Kalimantan Timur, diantaranya sungai Kendilo dan Mahakam. Upaya-upaya KLHK selama ini sudah mengarah kesana, diantaranya adalah rencana pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri untuk penambangan emas skala kecil (PESK) di Paser, dan lain-lain. Saat ini sedang berjalan pembenahan perizinan di sektor kehutanan dan pertambangan. Fraksi Partai Gerindra meminta KLHK agar mengawal hal tersebut dengan berorientasi pemenuhan ketentuan luas kawasan hutan proporsional pada undang-undang Cipta Kerja, jangan sampai menjadi legitimate degradasi kawasan hutan.
13. Dukungan KLHK untuk Pemberdayaan Masyarakat agar dapat menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Fraksi Partai Gerindra meminta agar kegiatan tersebut lebih mengoptimalkan Usaha Ekonomi Produktif dibanding item lainnya karena selain untuk meningkatkan pendapatan juga dapat membuka lapangan kerja baru. Selain itu, agar lebih inovatif kedepannya perlu kerjasama antar pihak-pihak terkait, misalnya

antar pengusaha dan pemerintah yang mengatur kebijakan. Apalagi kenaikan usulan anggaran belanja untuk Pemberdayaan Masyarakat untuk tahun 2023 cukup signifikan yaitu 58,25 % (985,21 Miliar) dari tahun sebelumnya (362,67 Miliar).

14. Sehubungan dengan permasalahan pertanahan yang telah dialami oleh 127 Kepala Keluarga di Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, dimana tanah di wilayah desa telah diukur dan dipasang patok batas oleh petugas BPN tahun 2011. Namun hingga saat ini tidak dapat diterbitkan sertifikat sebanyak 127 bidang tanah karena ada klaim dari Perhutani bahwa wilayah tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan yang dikelola oleh Perhutani. Fraksi Partai Gerindra meminta kepada KLHK untuk dapat membantu penyelesaian masalah ini dan menemukan solusi terbaik atas penyelesaiannya.

Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Ibu Menteri LHK, Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI beserta jajaran.

Demikian masukan dan pertanyaan ini disampaikan. Besar harapan kami di tahun 2022 dan seterusnya kondisi lingkungan hidup dan hutan kita semakin membaik dan memberikan manfaat baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KOMISI IV FRAKSI PARTAI GERINDRA DPR RI

G. Budisatrio Djiwandono	- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
Ir. KRTH. Darori Wonodipuro, M.M., IPU	- Kapoksi
DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc.	- Anggota
Ir. H. TA Khalid, M.M.	- Anggota
DR. H. Azikin Solthan, M.Si.	- Anggota
Ir. Dwita Ria Gunadi	- Anggota
Ir. Endro Hermono, .M.B.A	- Anggota